

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Angga, dkk., Makalah Sistem Pembuktian dan Beban Pembuktian Pada Matakuliah Hukum Pembuktian. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hamdani, Njowito, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Hamzah, Andi, Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jilid II. Jakarta: Pustaka Kartini, 2012.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007.

Kenter, E.Y. & Sianturi, S.R., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Penerapannya.

Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Lamintang, P.A.F. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Bandung: Pionir Jaya, 2002.

Marbun, D.C., Handout Hukum Pidana. Jawa Timur: Universitas Pembangunan

Nasional, 10 Februari 2009.

Marlina, Hukum Penitensier. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Marpaung, Leden, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan

Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2007.

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2011.

Ohoiwutun, Y.A. Triana, Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan

Hukum dan Permasalahannya). Malang: Dioma, 2006.

Pangaribuan, Luhut MP. Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan

oleh Advokat. Jakarta: Djambatan, 2005.

Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media,

2013.

Prints, Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta: Djambatan, 2008.

Prodjohamidjojo, Martiman, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti. Jakarta: Ghalia Indo-nesia, 2013.

Ranoemihardja, R. Atang, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Edisi Kedua. Bandung: Tarsito, 2013.

Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 2011.

Setiady, Tolib, Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Bandung: Alfabeta, 2009.

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006.

Soedjatmiko D., H.M. Ilmu Kedokteran Forensik. Malang: Fakultas Kedokteran Brawijaya, 2011.

Soedjatmiko, M. Ilmu Kedokteran Forensik. Malang: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Abdurrahman, H. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.

Sumaryanto, Djoko, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014.

Syarifin, Pipin, Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran. Jakarta: Djambatan, 2010.

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya). Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2012.

Jurnal

Cahyani, Ni Putu Mega, I Nyoman Sujana, I Nyoman, dan Widyantara, I Made Minggu. Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan, Jurnal Analogi Hukum, 3 (1) (2021), 122–128.

Zilvia, Rahmi dan Haryadi, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1, No. 1, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: No. 55/Pid.B/2019/PN Wng.